

Policy Brief

Kolaborasi Memperkuat Tata Kelola Pemanfaatan Kawasan Mangrove Kabupaten Banggai yang Berkeadilan serta Berkelanjutan

Rekomendasi kebijakan ini adalah pengembangan dari hasil Survey Mangrove TuK INDONESIA pada 17 Desa di Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah pada Juni-Juli 2022

Pendahuluan

Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, dan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah telah mencadangkan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) atau Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) masing-masing. Namun dengan terbitnya UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terutama mengenai kewenangan pengelolaan laut dan pesisir, sehingga kewenangan Bupati dalam pengelolaan kawasan konservasi menjadi kewenangan Gubernur. Mengingat hal tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mencadangkan kembali kawasan konservasi kepulauan Banggai dinamakan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil Banggai Dalaka (Darat, Laut dan Kepulauan) melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor 523/635A/ DIS.KANLUT-GST/2017 dengan luas 869.059,94 Ha.

Perairan Kabupaten Banggai memiliki tiga komponen ekosistem pesisir tropis penting yaitu terumbu karang, padang lamun, dan mangrove, dimana sumberdaya kelautan dan perikanan tersebut memiliki nilai penting dari aspek ekologis, ekonomis, budaya, sejarah dan ilmu pengetahuan. Selain memiliki komponen ekosistem pesisir utama yang mendukung sumber daya perikanan, kawasan Banggai merupakan habitat bagi spesies endemik yakni Banggai Cardinal Fish (BCF) yang dikenal memiliki nilai ekonomi akan tetapi terancam keberadaannya di habitat alaminya.

Selain BCF kawasan tersebut juga merupakan habitat dan jalur beberapa biota dilindungi berdasarkan peraturan di Indonesia dan aturan lainnya seperti Napoleon, Penyu, dan Bambu laut, sehingga diperlukan perhatian dari pemerintah dan dukungan masyarakat dalam pengelolaannya.

Kabupaten Banggai memiliki potensi kawasan mangrove cukup baik namun hingga saat ini belum terpetakan mulai sebaran desa dengan kawasan hutan mangrove, potensi luasan, pengelolaan dan ancamannya. TuK Indonesia telah melakukan penelitian survei di 17 Desa Kabupaten Banggai untuk memetakan beberapa ruang lingkup tersebut. Diharapkan dengan pemahaman holistik atas potensi dan manfaat dari kawasan hutan mangrove baik dalam hal ekonomi; sosial; dan lingkungan, maka selanjutnya dapat disusun peta jalan kebijakan dan peran kolaborasi multipihak yang efektif dalam mewujudkan tata kelola pemanfaatan yang adil dan berkelanjutan.

Banggai untuk Indonesia: Kontribusi dan Kebermanfaatan Mangrove Banggai

Terdapat beragam kontribusi dan kebermanfaatan mangrove jika dikelola dengan efektif, baik untuk komunitas sekitar kawasan; pemerintah daerah; bahkan hingga nasional.

Pertama, nilai manfaat ekonomi total dari pemanfaatan mangrove berkelanjutan di Banggai cukup besar. Berdasar perhitungan valuasi ekonomi yang dilakukan Putranto et al., (2018) dapat diketahui nilai total manfaat hutan mangrove di pesisir Kabupaten Banggai dan Banggai Kepulauan yakni sebesar 26,5 miliar rupiah per tahun. Hal tersebut terdiri dari nilai manfaat langsung dari potensi keberlanjutan kayu mangrove, hasil penangkapan kepiting dalam ekosistem mangrove, dan penangkapan ikan disekitar ekosistem mangrove sebesar 10,5 miliar per tahun. Nilai manfaat tidak langsung terlihat paling tinggi yakni sebesar 16 miliar per tahun, yang dihitung dari manfaat hutan mangrove sebagai penahan abrasi pantai, penahan gelombang laut dan mencegah bencana tsunami.

Kedua, Selain menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 19-41 persen pada 2030, Indonesia berpotensi mendapat pendapatan sebesar 8.000 triliun rupiah dari Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dari hutan mangrove dan gambut [1]. Luas area hutan mangrove di Indonesia saat ini mencapai 3,31 juta Ha yang mampu menyerap emisi karbon sekitar 950 ton karbon per hektare atau setara 33 miliar karbon untuk seluruh hutan mangrove di Indonesia (Kemenko Bidang Kemaritiman & Investasi, 2022).

**Rp 26,5
miliar
per
tahun**

**nilai total
manfaat
hutan
mangrove
di pesisir
Kabupaten
Banggai
dan
Banggai
Kepulauan**

[1] <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220315/9/1510884/indonesia-berpotensi-raup-pendapatan-rp8000-triliun-dari-perdagangan-karbon>

Total cadangan dari mangrove nasional sebesar 2,89 triliun ton karbon. Hingga saat ini, harga jual karbon dunia berkisar antara US\$5-10 per ton CO₂. Harga jual karbon juga menjadi lebih tinggi setelah Hasil Kesepakatan COP-16, dimana semakin meningkatkan permintaan global terhadap kredit karbon. Hal ini menjadi potensi yang perlu ditangkap bagi pemasukan Indonesia kedepan melalui peluang endowment fund.

Rp 8.000 triliun

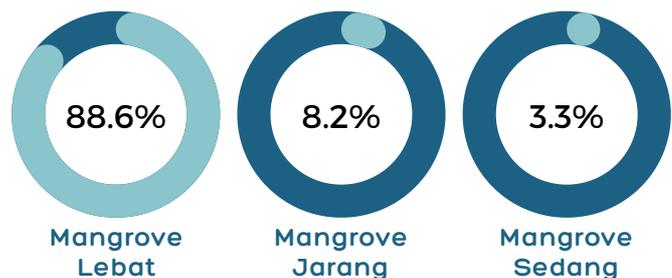
potensi pendapatan Indonesia dari Nilai Ekonomi Karbon (NEK) hutan mangrove dan gambut

Pengurangan emisi dalam Nationally Determined Contributions (NDC) selalu dikaitkan dengan hutan yang memiliki fungsi menyerap karbon di udara. Namun, kita juga perlu melihat adanya potensi emitan karbon lain yang mampu menyerap karbon setara atau bahkan lebih besar dari hutan daratan. Blue carbon atau karbon biru merupakan karbon yang diserap dan disimpan pada ekosistem pesisir dan laut, seperti ekosistem mangrove, padang lamun, dan rawa payau. Pengembangan blue carbon (karbon biru) sangat penting dan potensial di Indonesia, khususnya ekosistem mangrove. Menjaga dan memperbaiki ekosistem mangrove merupakan suatu cara ampuh untuk menjaga ekosistem kelautan Indonesia sekaligus membuat penangkap karbon yang baik.

Ketiga, Pemerintah selain mengejar target untuk penanaman mangrove di beberapa lokasi di Indonesia, tentu dapat mendorong dan memperkuat mangrove yang telah tersedia seperti di Banggai untuk masuk dalam agenda pengembangan blue carbon Indonesia. Pemerintah selama ini sudah menanam mangrove dari tahun 2010 sampai 2019 itu 45 ribu Ha lebih, dan selama tahun 2020 sudah menanam 39.970 Ha. Jadi pemerintah sudah menanam lebih dari 80 ribu Ha.

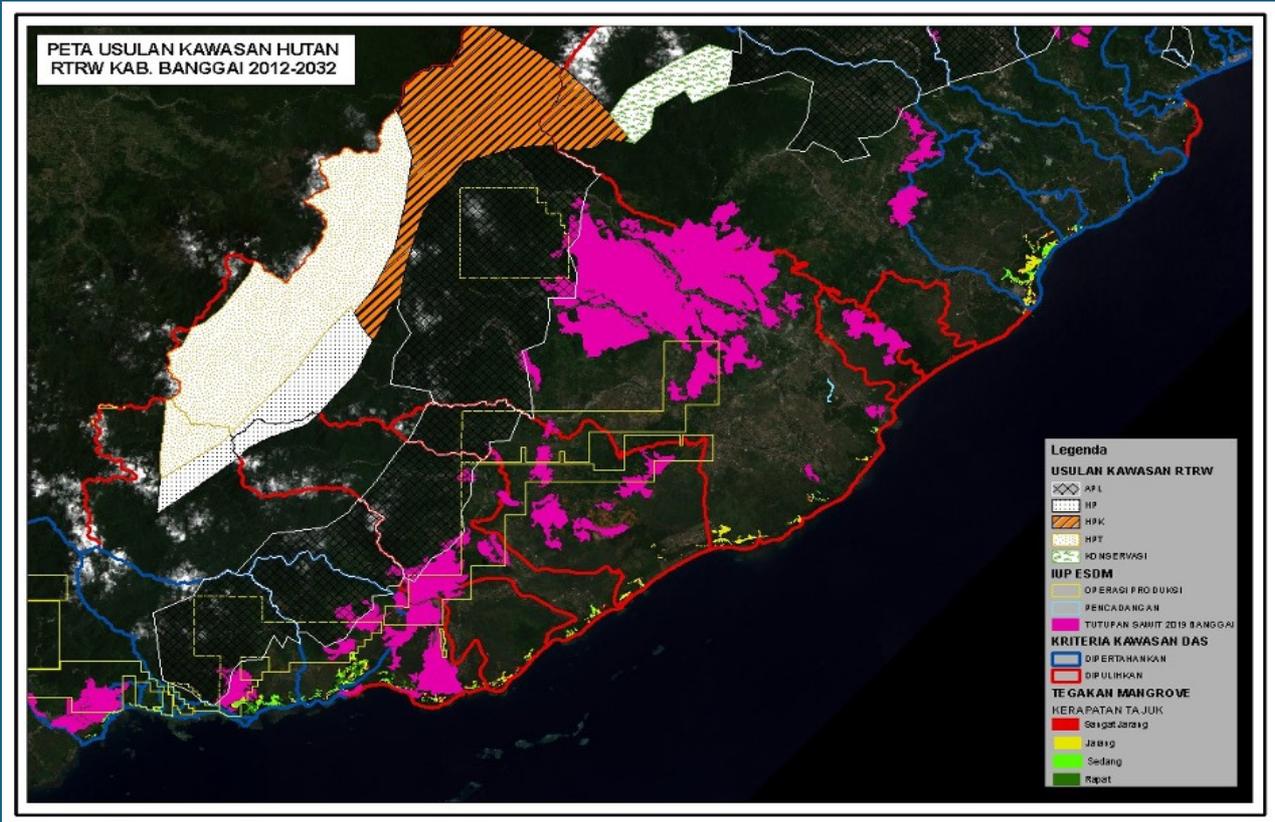
Target Presiden Jokowi hingga akhir kepemimpinannya, akan terus dilakukan penanaman mangrove sampai 600 ribu Ha lebih [2]. Hal ini juga sejalan dengan rekomendasi dari LIPI yang mendorong penguatan kebijakan dari pemerintah pusat hingga daerah untuk meningkatkan posisi tawar Indonesia nilai ekonomi karbon, yakni dengan memperluas area vegetasi atau mempertahankan yang telah ada [3] seperti di Banggai.

Keempat, ketersediaan mangrove Banggai berdasar data KKP (2022) terdapat tegakan mangrove eksisting seluas 4,9 ribu Ha. Sebesar 88 persen atau 4,3 ribu Ha merupakan mangrove dengan kategori tutupan lebat.



Sumber: KKP (2022)

[2] <http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/6504/pemerintah-perkuat-capaian-pengurangan-emisi-melalui-blue-carbon>
 [3] <http://lipi.go.id/lipimedia/mengangkat-lagi-potensi-karbon-biru/12351>



Peta Overlay Mangrove dengan Pemanfaatan Lain
 Sumber: Hasil olahan TuK INDONESIA (2022)

Tantangan Tata Kelola Mangrove Banggai

Tantangan pertama, terlihat dari hasil survei yang dilakukan TuK INDONESIA (2022) didapatkan informasi terkait ancaman kawasan hutan mangrove di Kabupaten Banggai bahwa penebangan liar oleh penduduk untuk kebutuhan pribadi seperti untuk bangunan rumah dan kayu bakar menduduki urutan tertinggi yakni sebesar 42,31%, disusul oleh perusahaan tambak dan penebangan liar penduduk 15,38%, dan selanjutnya adalah perusahaan tambak sebesar 11,54%, dan 15,38% tidak memiliki ancaman kerusakan kawasan hutan mangrove karena ada himbaun dari pemerintah setempat untuk tidak melakukan penebangan di kawasan hutan mangrove.



Ancaman Kawasan Hutan Mangrove
 Sumber: Hasil survey TuK INDONESIA (2022)

Tantangan kedua, yakni dari 17 Desa/Kelurahan yang di survei oleh TuK INDONESIA, didapatkan informasi bahwa 88,46% belum ada pengelolaan Kawasan hutan mangrove yang dilakukan oleh pemerintah desa atau pun masyarakat sekitar kawasan. Sehingga kompleksitas kerusakan mangrove di Banggai sejalan dengan intensitas kerusakan yang terjadi dari ancaman pemanfaatan destruktif, hal tersebut muncul karena tidak adanya kontrol/pengawasan dan lemahnya kelembagaan lokal dalam tata kelola mangrove.



Memperkuat Sinergi Multipihak dalam Tata Kelola dan Pemanfaatan Mangrove

Sebagai upaya terciptanya tata kelola pemanfaatan mangrove yang adil dan berkelanjutan, maka sangat penting melakukan identifikasi stakeholder dan peran mereka menuju model pengelolaan kolaboratif. Berdasar aktor stakeholder dapat diidentifikasi subyek dan peran masing yang dapat dikolaborasikan:

Pertama, Pemerintah Pusat berperan penting dalam akselerasi tata kelola yang berkeadilan dan berkelanjutan (Kalsum et al., 2022). Hal tersebut dapat diupayakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama-sama Kemenkomarves dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Bappenas, serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) yang memang saat ini sedang terus menata persoalan perlindungan dan rehabilitasi mangrove secara nasional melalui program strategis yang dimiliki masing-masing K/L [4].

Melalui KLHK, tata kelola pemanfaatan mangrove di Banggai dapat diupayakan melalui sinkronisasi pada Peta Mangrove Nasional (PMN) [5]. Hal ini merupakan rekoginisi yang sangat penting bagi pengelolaan mangrove di Banggai kedepan. Dengan sinkronisasi dan reupdate peta mangrove di banggai tersebut diharapkan dapat menjadi acuan dalam perencanaan program dan pengambilan kebijakan pengelolaan mangrove (bahkan membuka dukungan juga dari Bappenas dan Kemenkomarves kedepan).

Sinergi juga dapat dibangun dengan KKP-RI melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) yang tengah menyiapkan kegiatan rehabilitasi pesisir di sejumlah wilayah Indonesia.

[4] <http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/5903/menata-langkah-perindungan-dan-rehabilitasi-mangrove-nasional>

[5] https://www.menlhk.go.id/site/single_post/4476/peta-mangrove-nasional-tahun-2021-baseline-pengelolaan-rehabilitasi-mangrove-nasional

Tak hanya penanaman mangrove, KKP juga akan melaksanakan kegiatan restorasi dan beberapa kegiatan lainnya yang ditujukan untuk keberlanjutan ekosistem. Peluang Program yang dapat diaktualisasikan di Banggai oleh KKP sesuai program kerja yang dimiliki antara lain: penanaman mangrove; pusat restorasi dan pengembangan ekosistem pesisir; pelatihan dan bantuan sarana pengolahan produk turunan mangrove; pembangunan nursery mangrove; dan program pelopor bakti mangrove nusantara.



Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 tentang BRGM yang diberi tugas melaksanakan percepatan rehabilitasi mangrove. Walau mandat kerja dalam Perpres tersebut hanya di 9 provinsi prioritas, namun BRGM perlu menjadi katalisator melalui program-program mereka dengan mendukung wilayah diluar target prioritas untuk mempercepat target capaian rehabilitasi mangrove. BRGM memiliki program Desa Peduli Gambut untuk mendorong perubahan paradigma tentang restorasi gambut dan membantu desa-desa untuk meningkatkan status desa. Kegiatan utama mereka dari program yang ada seperti penempatan fasilitator di desa, pemetaan sosial, ekonomi serta spasial, pemberdayaan ekonomi, dan integrasi restorasi gambut dalam dokumen perencanaan desa sangat penting untuk hadir dalam memperkuat tata kelola mangrove di Banggai.

Kedua, Pemerintah Daerah sangat berperan penting dengan menyediakan ekosistem regulasi yang memadahi, bahkan penting juga melakukan rekognisi inisiatif baik atas upaya yang telah dilakukan oleh komunitas masyarakat.

Ketiga, peran Pemerintah Desa dan Masyarakat sangat penting bagi keberlanjutan ekosistem kawasan mangrove di Banggai. Hal yang perlu dilakukan dalam mendukung tata kelola yang berkeadilan dan berkelanjutan atas mangrove adalah dengan memperkuat kesadaran mereka dan meningkatkan peran serta masyarakat melalui pemberdayaan. Masyarakat memiliki peran yang lebih efektif dalam pengelolaan mangrove dan perbaikan kualitas pesisir di Banggai, karena masyarakat setiap hari berinteraksi dengan lingkungan, sehingga pengelolannya akan lebih efektif dan efisien.

Berdasar temuan survei (TuK INDONESIA, 2022) memperlihatkan beberapa desa penting untuk diupayakan penguatan kelembagaan desa dan kesadaran komunitas dalam tata kelola mangrove. Sebagai contoh di Desa Sobol sudah berinvestasi dalam pengembangan ekowisata mangrove, namun masih lemah kelembagaan dan pengelolaan berbasis komunitas. Selanjutnya di Desa Lomba telah muncul inisiatif pengelolaan ekowisata mangrove yang berjalan dengan baik dengan dukungan pemerintah desa. Terakhir, di Desa Rata dan Dongin masyarakat telah beralih dari pemanfaatan langsung yang cenderung destruktif atas mangrove (sebelumnya sering mengambil kayu mangrove), sekarang beralih pada pemanfaatan hasil di dalam ekosistem mangrove yakni kepiting. Namun kesadaran pengetahuan masih rendah, sehingga semua jenis dan ukuran diambil.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Mangrove di Banggai terlihat memiliki potensi yang cukup baik, maka tata kelola pemanfaatan yang adil dan berkelanjutan perlu di upayakan bersama. Hal tersebut terlihat dari manfaat yang muncul dari nasional, daerah, bahkan hingga komunitas. Di tingkat nasional potensi mangrove Banggai mampu mendukung upaya target capaian NDC Indonesia dan peluang endowment fund dengan ketersediaan blue carbon. Pada tingkat daerah, terlihat potensi PAD yang dapat dimunculkan. Selain itu juga bagi Pemerintah Daerah dan komunitas, dapat menikmati nilai manfaat langsung (tangkapan ikan dan kepiting) serta nilai manfaat tidak langsung yang terlihat paling tinggi yakni sebesar 16 miliar rupiah per tahun, yang dihitung dari manfaat hutan mangrove sebagai penahan abrasi pantai, penahan gelombang laut dan mencegah bencana tsunami. Oleh karena itu, TuK INDONESIA merekomendasikan:

Pemerintah Pusat

- Sangat perlu memberikan rekognisi kelola mangrove yang terdapat di banggai dengan mengupayakan sinkronisasi pada Peta Mangrove Nasional (PMN)
- KLHK, KKP RI, BRGM, Bappenas, dan Kemenkomarves perlu mengakselerasi potensi pengelolaan mangrove Banggai dan mendukung melalui kegiatan rehabilitasi dan restorasi mangrove (melalui program strategis yang dimiliki K/L) sejalan dengan mandat Presiden

Pemerintah Daerah

- Menjamin pengembangan potensi mangrove Banggai yang adil dan berkelanjutan dalam RPJMD dan RPJPD.
- Pemerintah Daerah perlu menjamin agar RDTR yang teridentifikasi kawasan mangrove tidak terkonversi untuk penggunaan lain (sawit, tambang, dan konversi mangrove skala luas lainnya)
- Merekognisi pengelolaan mangrove yang telah diupayakan oleh komunitas, dan pembinaan melalui sadar pengetahuan atas pemanfaatan mangrove yang berkelanjutan

Seluruh referensi tulisan ini terdapat pada barcode berikut:

